

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Achjani Zulfa, Eva, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2016.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

*Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice.

**C. Jurnal**

Febriyan, *Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 9, Nomor 1, 2015.

Joko Rudiantoro, Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat, Jurnal IUS, Volume 2, Nomor 6, 2014.

**D. Website :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jayapura\\_Selatan,\\_Jayapura/](https://id.wikipedia.org/wiki/Jayapura_Selatan,_Jayapura/) diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.02 wib